Sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, Indonesia menghadapi persoalan-persoalan yang disebabkan oleh perjumpaan para pemeluk agama yang berbeda. Persoalan ini tidak hanya muncul terkait perbedaan ajaran agama, tetapi juga karena persoalan politik, ekonomi, dan kekuatan. Karenanya, kerukunan agama menjadi persoalan yang mendesak di Indonesia. Kementerian Agama adalah kementerian yang berkaitan langsung dengan persoalan kerukunan agama. Tidak jarang Menteri dalam pidatonya menyebutkan beragam hal dalam isu kerukunan sehingga dapat dijumpai konseptualisasi, ideologi, dan hubungan kekuatan dalam wacana kerukunan agama yang diciptakan oleh Kementerian Agama.

Buku ini memperlihatkan bagaimana Menteri Agama menggunakan bahasa dalam pidato-pidato para menteri khususnya tahun 1998-2011 untuk menggambarkan dan menjelaskan pandangan, evaluasi, usaha, peran, dan otoritas Kementerian Agama dalam persoalan kerukunan beragama. Pembatasan waktu dalam buku ini dilandasi bahwa tahun 1998 merupakan awal reformasi di mana konflik antar umat Islam dan Kristen masih berlangsung di Ambon, sementara tahun 2011 terjadi konflik di Cikeusik di mana 3 pengikut Ahmadiyah mati terbunuh. Kejadian ini seperti bunyi alarm untuk mengingatkan ada yang salah dalam masyarakat. Reformasi yang mengkritik keras akan keseragaman dan sentralitas pemerintahan masa Orde Baru mengindikasikan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan keseragaman tetapi pengakuan akan perbedaan. Tentu saja, kemudian ini menjadi tugas yang tidak mudah bagi Kemenag karena perbedaan agama terutama intra agama adalah isu yang sangat sensitif. Dengan kejadian tersebut, cukup menjadi alasan untuk mengeksplorasi secara mendalam perjalanan pengelolaan keberagaman dalam wacana pemerintah tentang kerukunan beragama.

Bahasa-bahasa Kementerian Agama juga mengartikulasikan ideologi Kemenag dalam persoalan konflik, dialog agama, dan kebebasan beragama. Ditambah lagi, hubungan kekuatan antara pemerintah dan masyarakat secara umum, pemerintah dan kelompok mainstream, pemerintah dan kelompok minoritas, dan kelompok mainstream dengan kelompok minoritas juga tampak jelas dalam wacana yang dikembangkan. Buku ini juga memperlihatkan retorika Kementerian Agama terkait tuntutan dan harapan dari masyarakat sipil. Pada akhirnya, wacana Kementerian Agama memperlihatkan sejauhmana pengakuan, penerimaan, rasa hormat, keadilan, mempertahankan perbedaan, dan jaminan kebebasan dan kesetaraan yang menjadi syarat bagi kerukunan beragama terimplementasi dalam masyarakat. Sementara itu, wacana kerukunan dalam pidato-pidato menteri juga menimbulkan pertanyaan tentang evaluasi, konsisten, dan keberlanjutan dalam mengelola keberagaman agama di Indonesia.

ISBN 978-602-5450-98-3

9 786025 450983

NEGARA, AGAMA, DAN PRAKTEK SOSIAL MASA REFORMASI - Analisis Wacana Kerukunan Beragama **MEGA HIDAYATI**

MEGA HIDAYATI

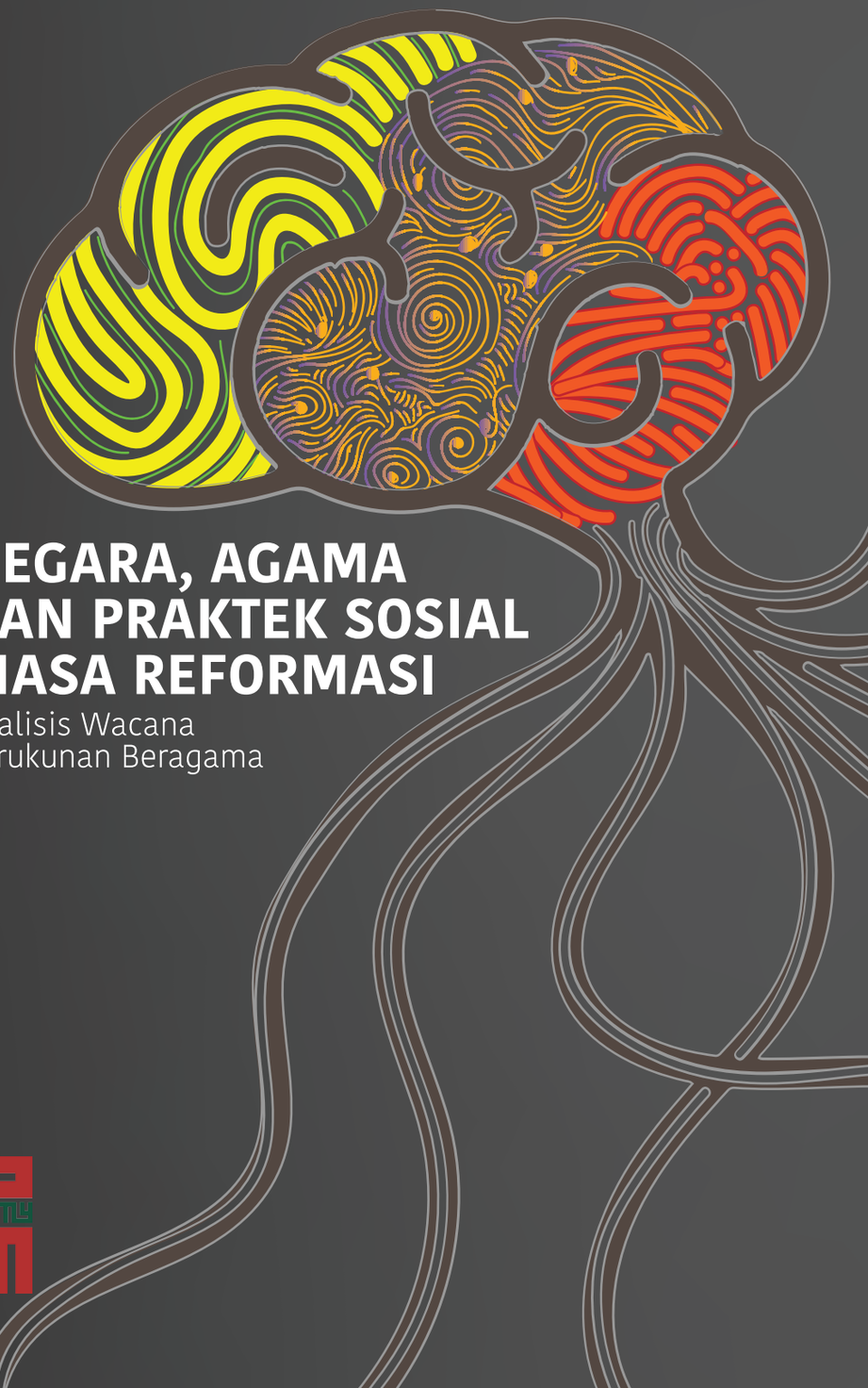

NEGARA, AGAMA DAN PRAKTEK SOSIAL MASA REFORMASI

Analisis Wacana
Kerukunan Beragama